

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1997 , Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi, hal tersebut diperparah dengan rendahnya penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan, yang ditandai dengan banyaknya pengelolaan perusahaan yang tidak transparan, sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan banyaknya perusahaan yang mana pemegang saham terbesarnya adalah keluarga , sehingga menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan norma- norma tata kelola perusahaan.

Dalam dunia ekonomi *Corporate Governance* atau pengelolaan perusahaan merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara . Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada saat ini bukan lagi suatu hal yang menjadi kapatuhan ,melainkan juga sebagai kebutuhan dalam setiap perusahaan maupun organisasi.

Diperlukannya *Good Corporate Governance* (GCG) ialah untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan , dan konsisten dengan peraturan perundang – undangan yang telah ada. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) perlu didukung dengan tiga hal yaitu dunia usaha sebagai pelaku pasar, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa, dan negara beserta perangkatnya sebagai regulator, yaitu pengatur sekaligus pengawas dalam pasar

Ketidakmampuan sektor swasta dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak debitor disebabkan karena pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan yang tidak semua terkontrol oleh pemerintah akibat dari lemahnya peraturan dan perundangan yang mengatur sistem pengelolaan perusahaan di Indonesia dan ketidakjelasan peraturan akan hak dan kewajiban pihak – pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan seperti pemegang saham , dewan komisaris maupun direksi serta *stake holder* lainnya membuat kontrol perusahaan menjadi sangat longgar sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran yang tidak sesuai dengan prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG).

Dengan tidak terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam perusahaan yang tercermin pada kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis resiko atau hasil , sehingga terjadi investasi yang berlebihan pada saat yang tidak produktif dan dengan tidak terlaksananya prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam suatu perusahaan juga menyebabkan investor atau para pemodal berfikir bahwa perusahaan tersebut tidaklah sehat atau bisa saja terjadi praktik – praktik kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengelolaannya. sehingga menurunkan kepercayaan dari investor atau para pemodal.

Untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan dari investor atau para pemodal ,perusahaan harus menerapkan prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam perusahaan sesungguhnya tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan dari investor atau para pemodal tetapi

juga agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten, meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, dan mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan.

Prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG) yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan ,yaitu : transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya *corporate governance*.sesuai dengan *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2010:4), antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder's value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Dimulainya penerapan *good corporate governance* (GCG) di Indonesia merupakan pangkal dari perubahan budaya kerja dalam perusahaan. Dengan *good corporate governance* (GCG) , perusahaan dan pemerintah diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi tranparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan
2. Apakah penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi tranparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan
3. Dari penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi tranparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran ,mana yang lebih dominan terhadap kinerja keuangan perusahaan

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Maksud dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan mengenai prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG). Dan kinerja keuangan dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat diketahui pengaruh dari penerapan prinsip –

prinsip *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran terhadap kinerja keuangan perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran terhadap kinerja keuangan perusahaan
3. Untuk mengetahui dari penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran ,mana yang lebih dominan terhadap kinerja keuangan perusahaan

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MAHARDHIKA. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diambil manfaat, sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengaruh penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan

## 2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Melalui karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama

## 3. Aspek Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja keuangan dengan cara menerapkan *prinsip – prinsip good corporate governance* (GCG).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Sejarah *Good Corporate Governance***

Lahirnya GCG (*Good Corporate Governance*) muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya . Yang pada saat itu di Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik. Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan -kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG ialah untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham,. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Di Indonesia , konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan– perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN (Budiati, 2012).

GCG mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia setelah adanya usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia / BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998.

Sejauh ini penegakan aturan untuk penerapan CGG belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun yang sudah menerapkan tetapi tidak sesuai standar pelaksanaan GCG. Namun pelaksanaan penerapan GCG memberi nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar (Cheung, 2011).

### **2.1.2. Definisi *Good Corporate Governance***

FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) mengartikan *corporate governance* sebagai Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara Pemegang Saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur



dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). (FCGI, 2011)

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Sir Adrian Cadbury, dalam buku Sutedi (2011) yang berjudul *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. *Corporate Governance* juga memberikan penekanan pentingnya penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* khususnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan tertentu.

Menurut Sutedi (2011) yang berjudul *Good Corporate Governance*, menyebutkan bahwa dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakeholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya, *Good Corporate Governance* secara definisi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan pada konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparansi terhadap semua informasi kinerja

perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Pada prinsipnya *corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak – pihak yang berkepentingan dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan komisaris dan komite audit.

### 2.1.3. Prinsip – prinsip GCG

Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut :

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Menurut KNKG untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (*stake holder*). Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko,

sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip Dasar :

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG (*Good Corporate Governance*).

- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
  - d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
  - e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Prinsip Dasar :

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan :

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip Dasar :

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode deskriptif Kuantitatif.

Pengertian dari metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:21), adalah: “Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”

Adapun pengertian lain dari metode deskriptif menurut Moh. Nazir (2011:63), yaitu: “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan secara fenomena yang diselidiki.”

Sedangkan pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Moh. Nazir (2011:71), adalah: “Penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang.”

Sedangkan pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2010:13), adalah: “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Sehingga dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Metode Deskriptif Kuantitatif ialah metode yang digunakan untuk melihat dan menggambarkan lingkungan atau keadaan yang tampak nyata dalam perusahaan dengan cara mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas objek yang diteliti agar dapat diambil suatu kesimpulan.

## **3.2. Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2013: 80) adalah sebagai berikut : Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sedangkan menurut Hartono (2011:46) ,populasi dengan karakteristik tertentu ada yang jumlahnya terhingga dan ada yang tidak terhingga.

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini oleh peneliti ialah seluruh karyawan di PT JATIM LOGAM, yang berjumlah 50 (Lima Puluh) orang.

### **3.2.2. Sampel**

Sampel (bahasa Inggris: *sample*) merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti; dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri.[1] Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang

diamati.[2] Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu secara acak (random)/probabilita dan tidak acak (non-random)/non-probabilita. (www.Wikipedia.com : 2015)

Sedangkan menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik sampling banyak menggunakan teori probabilitas sehingga berdasarkan tekniknya dikategorikan menjadi dua disebut *probability sampling* dan *non-probability sampling*.

*Probability sampling* adalah teknik sampling dimana setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. (laporanpenelitian.com:2014)

Berikut macam-macam metode *probability sampling* :

1. *Simple Random sampling* : pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu
2. *Proportionate stratified random sampling* : digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan berstrata secara proporsional
3. *Dispropotionate stratified random sampling* : digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proposional.
4. *Cluster sampling* : digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.

(<http://lusi-angraini.blogspot.co.id//> : 2011)



Teknik *non-probability sampling* bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgment, status, kuantitas, kesukarelaan dan sebagainya. (laporanpenelitian.com:2014)

Ada bermacam-macam metode *non-probability sampling* dengan turunan dan variasinya, tapi paling populer sebagai berikut:

1. Sampling Kuota (*Quota Sampling*)

Mirip *stratified sampling* yaitu berdasarkan proporsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias. Misalnya, jumlah sampel laki-laki 50 orang maka sampel perempuan juga 50 orang.

2. Sampling Kebetulan (*Accidental Sampling*)

Pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Misalnya, populasi adalah setiap pengguna jalan tol, maka peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan melintas di jalan tersebut pada waktu pengamatan.

3. Sampling Purposive (*Purposive or Judgemental Sampling*)

Pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus. Peneliti membuat kriteria tertentu siapa yang dijadikan sebagai informan. Misalnya, Anda meneliti kriminalitas di Kota Semarang, maka Anda mengambil informan yaitu Kapolresta Semarang, seorang pelaku kriminal dan seorang korban kriminal.

4. Sampling Sukarela (*Voluntary Sampling*)

Pengambilan sampel berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Metode ini paling umum digunakan dalam jajak pendapat.

#### 5. Sampling Snowball (*Snowball Sampling*)

Pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Misalnya, penelitian tentang korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua lalu informan ke tiga dan seterusnya.

(laporanpenelitian.com:2014)

### 3.3 Definisi Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan, maka terdapat dua variable yang akan dianalisis, yaitu :

#### 1. Variabel Independen (Variabel X)

Variabel Independen atau variabel bebas menurut Indriantoro (2009;63) ialah tipe variabel yang menjelaskan atau variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen atau variabel bebas adalah penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaan. Prinsip ini terdiri atas Transparansi ( $X_1$ ) yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi , Kemandirian ( $X_2$ ) yaitu penyediaan tenaga ahli pada tiap divisi,dan tidak adanya campur tangan dari lembaga tertentu , Akuntabilitas ( $X_3$ ) adanya pengawas internal , pertanggungjawaban ( $X_4$ ) yaitu perusahaan mempunyai program untuk masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat, dan kewajaran ( $X_5$ ) ialah visi misi perusahaan yang sesuai dengan keinginan *stakeholder* dan telah diketahui serta dipahami oleh seluruh staff perusahaan.

## 2. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen atau variabel terkait menurut Indriantoro (2009;63) ialah tipe variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat ialah kinerja keuangan yang di peroleh dari laporan laba rugi , dan neraca dengan jangka 2 tahun.

Penentuan indikatornya dengan membandingkan tingkat rasio *Return on Investment* yang terdiri dari 2 yaitu *Return of Asset* dan *Return of Equity* dari masing-masing tahun tersebut.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penerapan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dan kinerja keuangan PT. JATIM LOGAM yang berada di kawasan industri *Tanrise Southgate* Kav. C -10 , Jl. Nangka Sruni , Gedangan – Sidoarjo.

##### **4.1.2 Sejarah Singkat PT. JATIM LOGAM**

PT. JATIM LOGAM adalah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri berdiri pada tahun 2008. berdasarkan Akte Notaris Irawati Njoto, SH, No. 2 tanggal 2 – Juni - 2008, dan di sahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. AHU-42267.AH.01.01 tahun 2008 Memproduksi Bronjong Kawat *Hexagonal ( Gabions )* dan produksi tersebut dinamakan “Jatim Gabion”.

PT. JATIM LOGAM menetapkan dan mengimplementasikan suatu Sistem Manajemen Mutu yang mengadopsi SMM ISO 9001:2008, Pedoman BSN 10 Th. 1999 dan Standar Nasional Indonesia yang relevan dengan produk untuk memperbaiki kinerja manajemen dan sistem serta memenuhi kepuasan pelanggan (*Customer*).

##### **4.1.3 VISI PT. JATIM LOGAM**

**PT. JATIM LOGAM** adalah perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri.

#### **4.1.4 MISI PT. JATIM LOGAM**

PT. JATIM LOGAM sebagai perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi pabrikan Bronjong terkuat di dalam pemasaran di Indonesia Wilayah Timur.

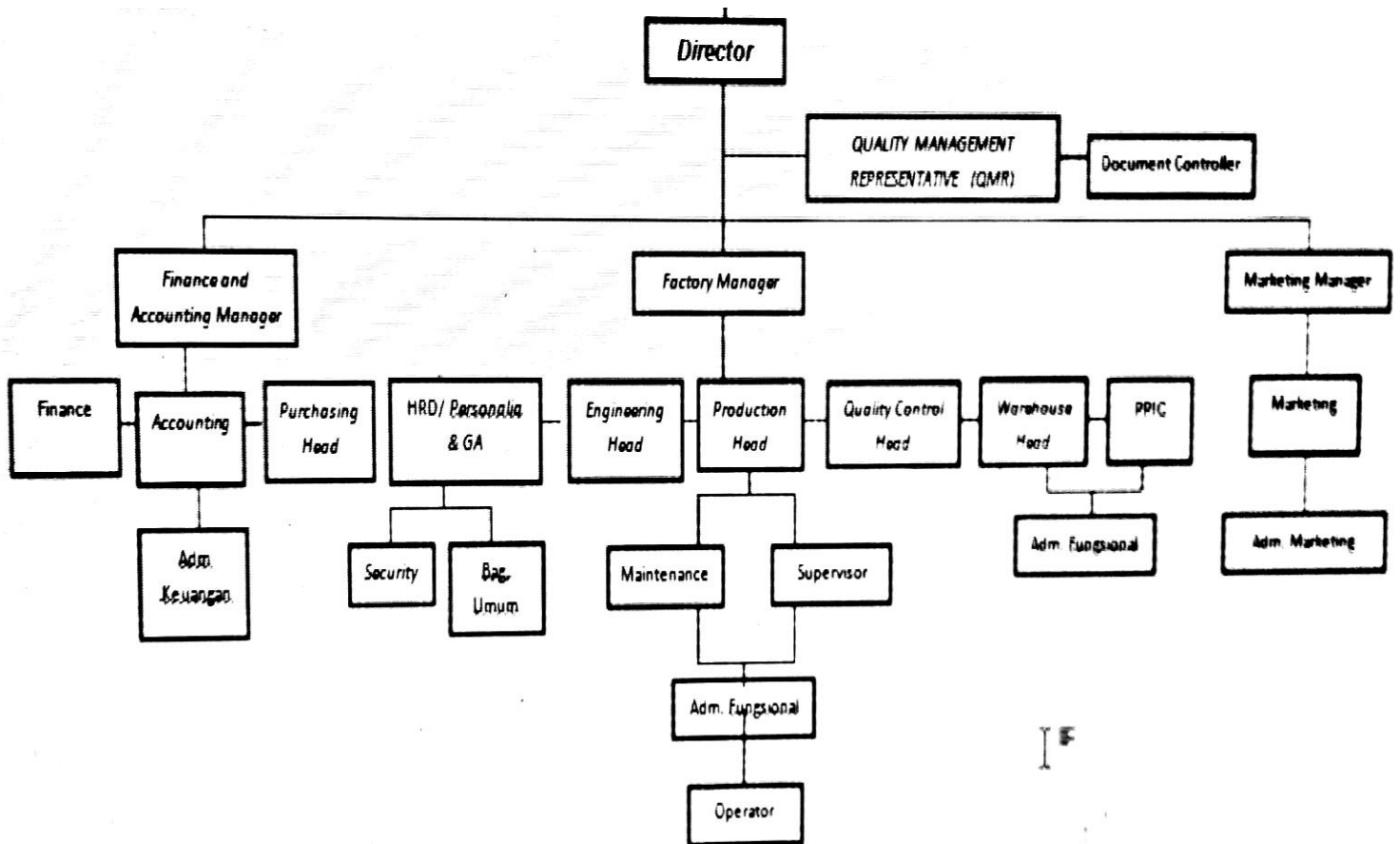
#### **4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan PT. JATIM LOGAM**

Pada PT. JATIM LOGAM terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas , hal ini dimaksudkan adanya pegawai saling melempar tanggungjawab. Pada dasarnya Organisasi dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan dibuatnya kerangka kerja didalam tiap tingkatan atau bagian yang ada dalam perusahaan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab ke arah sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

PT. JATIM LOGAM ialah perusahaan yang bergerak dibidang industri Bronjong kawat yang menganut tipe struktur organisasi fungsional . Kegiatan perusahaan dikelompokkan menjadi beberapa divisi yang memiliki fungsi masing-masing. Dengan dibuatnya divisi-divisi ini diharapkan pekerjaan dan tugas dapat berjalan dengan lancar dan baik,karena pekerja dapat memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaannya.

Struktur Organisasi yang ada dalam PT. JATIM LOGAM , sebagai berikut :

Gambar 4.1



Sumber : PT. JATIM LOGAM (2015)

### 3.1.6 Deskripsi Tiap Fungsi

Berikut adalah deskripsi dari tiap fungsi dalam organisasi yang ada pada PT. JATIM LOGAM :

#### 1. Director

1. Mengkomunikasikan ke organisasi tentang pentingnya pemenuhan persyaratan pelanggan serta pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan.
2. Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi.
3. Memastikan sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan organisasi.

4. Meninjau / melakukan review terhadap Sistem Manajemen Mutu organisasi untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan terus berlanjut.
5. Memastikan Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada selang waktu yang terencana.
6. Menetapkan dan memastikan ketersediaan Sumber Daya.
7. Menetapkan organisasi beserta dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki.
8. Menunjuk Quality Management Representative / Wakil Manajemen.
9. Memastikan komunikasi internal telah ditetapkan dan berjalan dengan efektif dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen mutu.
10. Menyetujui setiap konfirmasi penjualan produk.
11. Menyetujui surat permintaan produksi.
12. Menyetujui biaya operasional / pengeluaran uang untuk skala besar.
13. Mengetahui setiap *Purchase Order* (PO) untuk pembelian barang dan jasa (non ekspedisi) untuk nominal diatas 5 jt.
14. Mengetahui setiap *Delivery Order* (DO) dari pengeluaran barang jadi maupun waste jika *Finance & Accounting Manager* tidak masuk kerja.
15. Memastikan perbaikan dan pengembangan yang berkesinambungan terhadap keefektifan sistem manajemen mutu secara terus-menerus dilaksanakan.

## **2. QMR**

1. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu ditetapkan, didokumentasikan, diimplementasikan dan dipelihara serta terus menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

2. Memberikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan sistem manajemen mutu (isu-isu kualitas / ketidaksesuaian & laporan audit) serta kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan kepada Top Management (Direksi).
3. Memastikan kebijakan mutu organisasi dipromosikan secara jelas diseluruh organisasi.
4. Meninjau secara berkala pencapaian sasaran mutu dari masing-masing bagian serta perbaikannya jika diperlukan.
5. Menetapkan dan memelihara manual mutu organisasi.
6. Mengendalikan dokumen yang dipersyaratkan oleh sistem manajemen mutu baik dokumen internal maupun eksternal.
7. Menetapkan serta mengendalikan rekaman mutu sebagai bukti kesesuaian dengan persyaratan dan efektifitas operasional sistem manajemen mutu.
8. Melaksanakan Audit Mutu Internal pada selang waktu yang terencana, mulai dari penjadwalan, perencanaan, pelaksanaan proses audit sampai pada pelaporan hasil audit serta verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang ada.
9. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen pada selang waktu yang terencana, mulai dari penjadwalan, pengagendaan, pelaksanaan sampai pembuatan risalah rapat untuk pelaporan seta verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang ada.
10. Monitoring terhadap pelaksanaan pengendalian produk yang tidak sesuai.
11. Menetapkan, mengumpulkan dan menganalisa data untuk meninjau keefektifan sistem manajemen mutu serta sebagai bahan evaluasi apakah perbaikan dan pengembangan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu dapat dilakukan.



### **3. DCC (*Document Controller*)**

1. Membantu management representative dalam menjalankan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu.
2. Membantu *management representative* dalam penerbitan, pembaruan, dan pendistribusian surat-surat baik internal maupun eksternal.
3. Memasukkan data dokumen ke dalam daftar dokumen dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan up to date.
4. Memastikan dokumen disahkan sebelum didistribusikan.
5. Memastikan seluruh dokumen telah disosialisasikan dan didistribusikan ke bagian yang berkepentingan.
6. Memastikan seluruh dokumen disimpan dan dijaga dari kerusakan serta mudah untuk ditelusuri.
7. Menarik atau memusnahkan dokumen yang sudah kadaluarsa.

### **4. *Factory Manager***

1. Bertanggung jawab dalam menjalankan operasional pabrik.
2. Monitoring terhadap kinerja, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh divisi di ruang lingkungannya.
3. Menyetujui setiap rencana pembelian / pengadaan barang maupun jasa yang pada divisi di ruang lingkungannya.
4. Meninjau evaluasi penawaran rencana pembelian / pengadaan barang maupun jasa (non ekspedisi) pada ruang lingkungannya yang dibuat oleh Purchasing dan telah ditinjau oleh bagian terkait (pemohon).
5. Meninjau *Purchase Order* (PO) untuk pembelian / pengadaan barang maupun jasa di ruang lingkungannya (non ekspedisi).
6. Meyetujui pengajuan cuti pada level staff di ruang lingkungannya.
7. Menyetujui pengajuan pemberian Surat Peringatan (SP) pada level staff di ruang lingkungannya

8. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu pada ruang lingkungannya.
9. Merencanakan dan mengembangkan proses yang diperlukan untuk kebutuhan realisasi produk dan operasional pabrik.
10. Menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang tertib, aman dan nyaman untuk mencapai kelancaran operasional pabrik.
11. Melakukan pengendalian terhadap proses realisasi produksi agar produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan produk / standar mutu dan persyaratan pelanggan.
12. Monitoring terhadap perencanaan realisasi produksi, inventory bahan baku dan barang jadi agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan persediaan.
13. Monitoring terhadap proses pemantauan dan pengukuran (inspeksi) pada seluruh kegiatan realisasi produk mulai dari kedatangan bahan baku, proses produksi sampai pada barang jadi.
14. Monitoring terhadap proses realisasi produksi (berkaitan dengan karakteristik produk, identifikasi, efektifitas dan efisiensi serta produktifitas produksi).
15. Monitoring terhadap penanganan bahan baku dan barang jadi (meliputi identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan dan perlindungan) sampai pada proses pengiriman ke tujuan.
16. Berkoordinasi dengan Marketing Manager dalam rangka pemenuhan realisasi produk serta penanganan umpan balik dan komplain dari pelanggan.
17. Menyetujui jadwal kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian.
18. Monitoring terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengembangan dalam hal pemeliharaan, perbaikan / pergantian spare

part mesin serta peralatan dan perlengkapan penunjang produksi secara berkala untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk dan persyaratan pelanggan.

19. Monitoring terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengembangan dalam hal pemeliharaan, perbaikan / pergantian spare part dari semua sarana dan prasarana perusahaan secara berkala untuk menjamin kelancaran operasional pabrik.
20. Monitoring terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengembangan dalam hal rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia.
21. Memastikan semua peraturan perusahaan dan sistem manajemen mutu pada ruang lingkungannya berjalan dan dijalankan dengan baik.
22. Merencanakan kebutuhan dan menetapkan kualifikasi SDM kunci pada ruang lingkungannya.
23. Penilaian dan evaluasi kompetensi karyawan (personel) pada ruang lingkungannya.
24. Melakukan pengembangan sumber daya manusia (kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan internal maupun eksternal dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan sesuai dengan standar perusahaan) pada ruang lingkungannya.
25. Menegur karyawan pada ruang lingkungannya yang melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan.
26. Memberikan ijin tidak masuk kerja pada karyawan di ruang lingkungannya.
27. Monitoring terhadap pengendalian produk yang tidak sesuai.
28. Menetapkan, mengumpulkan, dan melakukan analisa data pada ruang lingkungannya.

29. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kerja pada ruang lingkungannya.
30. Aktif melakukan dan memonitor pelaksanaan perbaikan dan pengembangan yang berkesinambungan pada ruang lingkungannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sesuai tujuan hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menguji secara simultan dengan menggunakan uji F dapat diketahui nilai  $F_{hitung}$  (32.463) >  $F_{tabel}$  (3.33), yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) yang meliputi Tranparansi ( $X_1$ ), Kemandirian ( $X_2$ ), Akuntabilitas ( $X_3$ ), Pertanggungjawaban ( $X_4$ ) dan Kewajaran ( $X_5$ ) terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) pada PT. JATIM LOGAM
2. Dalam menguji secara parsial dengan menggunakan uji t, dapat diketahui bahwa variabel Tranparansi ( $X_1$ ), Kemandirian ( $X_2$ ), Akuntabilitas ( $X_3$ ), Pertanggungjawaban ( $X_4$ ) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) pada PT. JATIM LOGAM, dengan masing-masing memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 2.897, 2.604, 2.515, dan 2.934 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2.2281), sedangkan variabel Kewajaran ( $X_5$ ) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) pada PT. JATIM LOGAM, dengan  $t_{hitung}$  (-2.214) yang lebih besar dari  $-t_{tabel}$  (-2.2281)

3. Dalam menguji secara parsial dengan menggunakan uji t, dapat diketahui bahwa variabel Pertanggungjawaban ( $X_4$ ) yang paling berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Y) pada PT. JATIM LOGAM dengan  $t_{hitung}$  sebesar 2.934

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. JATIM LOGAM mampu melaksanakan dan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) secara benar, karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG memberikan pengaruh yang besar terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
2. Bagi penelitian yang akan datang, hendaknya mengembangkan penelitian dengan menambah variabel atau melakukan pada objek penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggraini,Lusi .2011.Populasi dan Sample.

<http://lusiangraini.blogspot.co.id/2011/12/populasi-dan-sampel.html>

(diakses pada tanggal 10 januari 2016)

Arief Effendi,Muh.2009,*The Power Of Governance*, Teori dan Implementasi,  
Jakarta,Salemba Empat

Arikunto,Suharsimi.2013.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka  
Cipta, Jakarta

Azwar ,Saifuddin ,2013, Reliabilitas dan Validitas, Pustaka Pelajar,Yogyakarta

Biaya,2016, <http://www.wikipedia.co.id> (diakses pada tanggal 03 Maret 2016)

Bonaditya. Tata Kelola Perusahaan, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata\\_Kelola\\_Perusahaan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tata_Kelola_Perusahaan) (diakses pada tanggal 5 April 2015)

Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance* Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,  
Ghalia Indonesia, Bogor

Cahaya Suryana , Data dan Jenis Data Penelitian. 2010.  
<http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>  
(diakses pada tanggal 4 maret 2015)

Cheung,Yan- Leung.,2011. *Does Governance Predict Future Performance/Evidence from Hong Kong. Financial Management, Spring 2011*

Dharmesta da Irawan, 2005, Manajemen Pemasaran Modern, Liberty,  
Yogyakarta

Dimas,Setiawan. Definisi Kinerja . **Error! Hyperlink reference not valid.**

(diakses pada tanggal 15 April 2015)

Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty ,2010, Analisis Laporan Keuangan,Cetakan Kedua,AMP YKPN , Yogyakarta

Dr. R.A Supriyono.S.U.,Ak.,2011. Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok, BPFE,Yogyakarta

FCGI,*Forun for Corporate Gofernance in Indonesia*, <http://www.fcgi.or.id>

(diakses pada tanggal 12 Januari 2015)

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. BP Universitas Diponegoro, Semarang

Gitusudarmo,Indriyono,2008, Pengantar Bisnis, BPFE, Yogyakarta

Hartono.2011.Metodelogi Penelitian. Zanava.Pekanbaru.

Indriantoro,Nur. 2009 , Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta

Fahmi,Irham. 2012. Analisis Kinerja Keuangan. Alfabeta. Bandung

Johnson,B & A Christensen ,L. 2012 Educational Research 4<sup>th</sup> Ed: *Quantitative ,qualitative, and mix-methods approaches. SAGE Publication. California*

Kotler,Philip. 2010. Manajemen Pemasaran , Alih Bahasa, Ronny A. Rusli dan Hendra teguh, prenhallindo, Jakarta

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), 2015, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, <http://www.governance-indonesia.co.id>

(diakses pada tanggal 10 April 2015)



Laba.Laba,2016, <http://www.wikipwdia.co.id> (diakses pada tanggal 03 Maret 2015)

La ode Sidratullah. Pengertian Kinerja Keuangan. **Error! Hyperlink reference not valid.** (diakses pada tanggal 4 April 2015)

Moekijat,2010.Manajemen Sumber Daya Manusia, Mandar Maju, Bandung

Munawir, 2010, Analisis Laporan Keuangan, Liberty, Yogyakarta

Mulyadi,2009 , Akuntansi Biaya, UPP STIM YKPN,Yogyakarta

Nazir, Mohammad ,2011, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia,Jakarta

Notoatmodjo,Soekidjo,2015,Metodelogi Penelitian Kesehatan,Rineka Cipta, Jakarta

Nurlaila,2010,Manajemen Sumber Daya Manusia I, Lepkhair

Pedoman GCG Perumnas, <http://perumnas.co.id> (diakses pada tanggal 07 April 2015)

Prabu Mangkunegara,A.A, Anwar .2010. Evaluasi Kinerja SDM. PT. Revika Aditama. Bandung

Rahardjo,Adisasmita, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu, Yogyakarta

Riyanto,2011, Sistem Informasi Penjualan dengan PHP dan MySQL, Gaya Media, Yogyakarta

Setianto,Buddy, 2015, Perbandingan Beberapa Metode Valuasi Saham Kelebihan dan Kelemahannya dan Metode Apa Yang Terbaik Berdasarkan Laporan Keuangan Kuartal II. BSK Capital, Jakarta

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta

Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Bandung

\_\_\_\_\_. 2013, Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung

Sukmadinata, Nana S. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya. Bandung

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta

Tutorial Penelitian. Jenis-jenis Teknik sampling. **Error! Hyperlink reference not valid.**? (diakses pada tanggal 10 Januari 2016)

Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja . Rajawali Pers. Jakarta